

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Partisipasi Masyarakat

2.1.1.1 Definisi Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis partisipasi masyarakat berasal dari bahasa latin *pars* yang artinya bagian, dan *capere* yang artinya mengambil. Dalam bahasa inggris *participation* yang berarti “mengambil bagian” atau “mengambil peran”. Sehingga dapat diartikan bahwa partisipasi berperan dalam kegiatan atau aktifitas. Partisipasi didefinisikan dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) sebagai keterlibatan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masayarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaannya.

Menurut Ach.Wazir (1999) dalam (Agusta et al., 2020: hlm.65) Menyatakan partisipasi dapat didefinisikan sebagai ketika seseorang dalam interaksi sosial dengan oranglain secara sadar terlibat dalam proses interaksi tersebut. Melalui definisi ini manusia dapat terjadi ketika seseorang menemukan dirinya sebagai dari kelompok yang memiliki kebiasaan, prinsip, dan tanggung jawab yang sama. Partisipasi merupakan salah satu bentuk dari motivasi yang akan mengembangkan suatu demokrasi sebagai hasil dari proses desentralisasi yang dapat memungkinkan perencanaan mulai dari bawah (*bottom-up*) dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan terhadap masyarakatnya. Berdasarkan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa yang melibatkan seseorang atau kelompok berinteraksi dan berkomunikasi dalam suatu kondisi untuk mencapai tujuan yang memerlukan kerja sama dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu yang melibatkan seseorang yang berhubungan dengan masyarakat dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat (H.A.R.Tilaar 2009 dalam Rahmawati et al., 2021: hlm.953).

Menurut Soetomo (2012) dalam (Rahmawati et al., 2021: hlm.953) Menyatakan partisipasi masyarakat dalam lingkungan pedesaan menunjukkan peran masyarakat dalam mendukung perubahan sosial melalui hubungan timbal balik antara masyarakat dan desa, yang berarti adanya ketergantungan antara

masyarakat dan desa dalam upaya untuk kemajuan baik masyarakatnya maupun desanya secara keseluruhan, sehingga pembangunan yang efektif dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, pembangunan yang efektif membutuhkan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Menurut Cohen, J., dan Uphoff (1977) dalam (Nurbaiti & Bambang, 2017: hlm.226) partisipasi didefinisikan sebagai partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara kerjanya; partisipasi keterlibatan dalam menjalankan program dan keputusan yang telah dibuat melalui kontribusi sumber daya atau bekerja sama dengan orang lain dalam suatu organisasi, keterlibatan masyarakat mendapatkan keuntungan dari konstruksi dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Pembangunan yang berhasil membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif, sehingga selain pembangunan yang memberikan pengaruh tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada tiga dasar utama partisipasi masyarakat sangat penting menurut Conyers et (1994: hlm.154) yang menyatakan pentingnya dasar utama partisipasi masyarakat ialah : 1) Partisipasi masyarakat sebagai alat untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan, kebutuhan, dan kegiatan masyarakat sektar. 2) Masyarakat akan percaya pada pembangunan jika orang yang bekerja merasa terlibat dalam proses perencanaan dan persiapan sehingga memiliki rasa tanggung jawab. 3) Adanya keyakinan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak demokrasi jika orang yang bekerja merasa terlibat.

2.1.1.2 Hubungan Antara Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2025) partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberdayaan, karena melalui partisipasi, individu dan kelompok belajar untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian. Partisipasi yang aktif menciptakan ruang belajar sosial dan politik bagi masyarakat agar mampu memperjuangkan kepentingan mereka secara mandiri. Senada dengan itu, Kartasasmita, G., Suryani, D., & Nugroho (2023) menyatakan bahwa pemberdayaan bukan hanya pemberian bantuan, tetapi proses partisipatif yang mendorong masyarakat mengidentifikasi, merencanakan, dan mengelola

pembangunan sendiri. Oleh karena itu, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam suatu program, maka semakin tinggi pula peluang untuk meningkatnya keberdayaan mereka.

Menurut Ife, J., & Frank Tesoriero (2008) keberdayaan (*empowerment*) dipengaruhi oleh partisipasi aktif yang mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi. Tanpa partisipasi, masyarakat cenderung menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang memiliki kontrol atas kehidupannya. Dengan demikian, dapat dirumuskan teori bahwa partisipasi anggota masyarakat, khususnya dalam organisasi seperti PKK, memiliki pengaruh terhadap peningkatan tingkat keberdayaan, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun kemandirian sosial-ekonomi.

2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, kegiatan sosial, dan pembangunan di kelompok mereka, dan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup, menciptakan keberlanjutan, dan memperkuat demokrasi. Namun, ada banyak faktor yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, dan variabel-variabel ini dapat memengaruhi tingkat yang berbeda. Marhum (2021:141) dalam Chafizah et al (2024: hlm.17) mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Tingkat Pendidikan yang lebih tinggi sering kali berhubungan dengan Tingkat partisipasi yang lebih tinggi, literasi, kebutuhan, kedudukan, serta status sosial lebih penting dari pada keberanterior dalam menentukan partisipasi individu dalam kegiatan, karena individu yang terdidik lebih mungkin memahami isu-isu dan merasa memiliki kemampuan untuk berkontribusi.
- 2) Kesadaran sosial dalam pemahaman dan kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan dapat mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah kurangnya pemahaman yang mendalam.

- 3) Tingkat penghasilan yang menguji hubungan antara keaktifan berpartisipasi dan tingkat penghasilan dan keputusan masyarakat untuk menerima, atau tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat penghasilan dan tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat penghasilan mempengaruhi partisipasi masyarakat. Faktor usia memengaruhi sikap seseorang terhadap aktivitas masyarakat.
- 4) Kelompok usia hingga lansia, yang umumnya memiliki komitmen moral yang kuat terhadap nilai dan norma sosial, cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.
- 5) Jenis kelamin bahwa tradisi di banyak budaya menyatakan bahwa peran utama perempuan ialah dalam urusan rumah tangga, namun peran ini telah berubah seiring dengan perkembangan gerakan emansipasi dan peningkatan pendidikan perempuan.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah semua pihak yang memiliki kebutuhan dan mempengaruhi program, stakeholder atau orang yang memiliki peran atau pengaruh yang signifikan (Hidayat, 2018).

2.1.1.4 Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat

Dalam hal ini menurut Cohen dan Uphoff (1980) dalam (Safitri et al., 2022: hlm.307) mengklasifikasikan partisipasi masyarakat dalam tahapan program pembangunan diantaranya:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan menentukan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang dibuat menyangkut kepentingan bersama atau perencanaan. Wujud dari partisipasi ini adalah adanya keikutsertaan masyarakat dalam menyumbangkan berbagai gagasan ataupun pemikiran dalam diskusi terbuka.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan dibutuhkan unsur-unsur dalam pelaksanaan program, hal ini menyangkut penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan suatu program yang sedang dilaksanakan.

- 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat Partisipasi yang dijalankan tentu memiliki output yang diharapkan dilihat dari kualitas, sedangkan persentase keberhasilan program dapat dilihat dari segi kuantitas. Hal ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas yang dicapai dari hasil pelaksana program.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi partisipasi ini berkaitan dalam pelaksanaan program secara menyeluruh yang artinya pada partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program.

Berdasarkan pendapat Cohen dan Uphoff (1977) dalam (Kalesaran et al., 2015) terhadap partisipasi masyarakat, dapat dipahami bahwa empat partisipasi diatas dapat menjelaskan mengenai bagaimana dan sejauh apa peran yang diambil untuk turut terlibat pada sebuah program. Keempat jenis tahapan partisipasi ini jika dilakukan bersama akan membentuk semacam siklus kegiatan pembangunan dengan memusatkan perhatian dengan membantu serta cara-cara dimana partisipasi sehingga dapat menjelaskan dan mengindikasikan kualitas partisipasi.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada umumnya tidak sekedar keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan fisik maupun memberikan daya, tetapi terdapat berbagai bentuk partisipasi masyarakat lainnya. Dengan demikian, dalam proses atau pelaksanaan kegiatan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat karena tahapan merupakan kesatuan dalam proses pembangunan. Selain itu, masyarakat juga dapat memahami dan menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta keadaan yang terdapat di masyarakat. Menurut Keith Davis Sastropoetro (1988) dalam (Erawati & Mussadun, 2013) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu:

- 1) Partisipasi pikiran adalah jenis level pertama pada partisipasi dengan bentuk berupa ide ataupun sudut pandang dari individu atau kelompok tertentu yang mempunyai tujuan untuk memperoleh yang diharapkan.
- 2) Partisipasi tenaga adalah jenis level kedua pada partisipasi dengan mengusahakan agar mampu menjalankan tugas dengan baik yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk memperoleh tujuan yang diharapkan.

- 3) Partisipasi pikiran dan tenaga adalah jenis level ketiga pada tingkat partisipasi yang dilakukan oleh seluruh kelompok atau individu dalam memperoleh tujuan yang bersama.
- 4) Partisipasi keahlian jenis level keempat dalam partisipasi dilakukan dengan keahlian yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Hal tersebut, menjadi bagian yang diharapkan dalam menentukan keinginan.
- 5) Partisipasi barang adalah jenis level kelima pada partisipasi yang menggunakan barang untuk menolong dalam mencapainya keberhasilan yang diharapkan.
- 6) Partisipasi uang adalah jenis level keenam dalam partisipasi ini, uang digunakan sebagai alat untuk mengukur sesuatu yang diantisipasi. Biasanya tingkat partisipasi yang disebutkan di atas dilakukan oleh orang-orang kalangan atas.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran, tenaga, keahlian, pikiran dan tenaga, barang, dan uang sangat penting untuk keberhasilan suatu program. Setiap kontribusi ini saling mendukung dan memberikan dampak positif, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Semakin besar dan beragam bentuk partisipasi yang diberikan, semakin efektif pula pencapaian tujuan bersama.

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat *empowerment* atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto, 2025:hlm 7).

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006) dalam (Margayaningsih, 2018:34) yaitu suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis yang

mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Pemberdayaan sebuah konsep yang fokusnya dalam kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek yang baru, sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subjek lain. Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang dihadapinya dan mampu menyelesaiannya.

Menurut Suharto (2025:hlm 59) Mengenai makna konsep pemberdayaan masyarakat, dimana yang mencirikan pemberdayaan yaitu: “Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai sebuah proses, pemberdayaan yang serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mata pencaharian, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya”.

Pemberdayaan artinya adalah proses untuk membantu masyarakat dan individual yang tidak diuntungkan untuk bersaing dengan baik dan keperluan lainnya, serta menolong masyarakat untuk belajar serta memanfaatkan saat bernegosiasi, memahami bagaimana sistem kerja, menggunakan media dengan baik dan benar, terlibat dalam tindakan polis dan lain sebagainya.

2.1.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan untuk membingkai orang dan masyarakat yang menjadi bebas, kebebasan ini mencakup kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, dengan demikian juga penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya disimpulkan sebagai masyarakat. Kemandirian masyarakat yaitu suatu keadaan yang dialami masyarakat dan digambarkan dengan kemampuan berpikir, memilih dan menyelesaikan sesuatu yang dianggap tepat untuk mencapai pemecahan masalah yang dialami dengan memanfaatkan daya kapasitas yang terdiri dari kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat, serta untuk menjadi mandiri perlu didukung kemampuan sebagai sumber daya manusia yang utuh dalam kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, serta sumber fisik-material lainnya. Pemberdayaan dalam keempat aspek tersebut akan berkontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang akan ada pengetahuan yang cukup, dan dilengkapi dengan ketrampilan yang memadai, didukung oleh rasa perlu untuk perbaikan dan perilaku sadar akan dalam kebutuhan ini, serta untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dibutuhkan suatu melalui metode belajar bahwa masyarakat yg akan mendapatkan keterampilan Ambar, S. T. (2017: hlm 80).

Menurut Mahardikanto (2014) dalam Afriansyah et al. (2023: hlm.7) dalam upaya pemberdayakan masyarakat yang berperan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya serta harus berhadapan dengan kondisi masyarakat yang masih dalam posisi dan kondisi yang lemah. Bisa jadi masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu secara keseluruhan tidak pernah diberdayakan. Oleh karena itu, arah pemberdayaan tidak dapat disangkal dan berfokus pada temuan yang objektif dari masyarakat itu sendiri. Dilihat dari sisi yang lain mungkin saja tujuan yang harus diberdayakan hanya penting bagi suatu masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuatan yang dapat di contohkan disini misalnya kehidupan metropolitan yang tidak, yang benar-benar heterogen dalam pendapat.

Ada warga negara yang kaya, makmur, berpenghasilan rendah, dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan heterogenitas ini, ada individu-individu tertentu yang sebenarnya tidak perlu dilibatkan, namun disisi lain masih ada perkumpulan yang harus diberdayakan. Sementara itu, untuk melengkapi komunitas yang baik perlu ditambah kemampuan sebagai berikut:

- a) Dapat mengidentifikasi masalah dan keperluan masyarakat.
- b) Dapat memperoleh peluang tentang target yang seharusnya diperoleh dan skala prioritas.
- c) Dapat mendapatkan dan menyepakati cara dan alat untuk memperoleh tujuan yang sudah disepakati.
- d) Dapat bekerjasama secara rasional dalam bertindak mencapai tujuan.

Menurut Sumaryadi (2025: hlm 115) dalam kemampuan-kemampuan tersebut adalah kemampuan penolong untuk memimpin masyarakat supaya memiliki pilihan untuk berpikir, menemukan dan memastikan resolusi utama pada pembangunan sosial, keterampilan keempat adalah kemampuan masyarakat untuk memutuskan cara dalam memahami resolusi yang tidak benar-benar ditetapkan. Secara umum akan terwujud apabila proses pembelajaran dilakukan secara efektif. Sistem pembelajaran merupakan suatu keharusan untuk diambil, karena sebagai suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan.

Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat, menghilangkan ketidak seimbangan sehingga tercipta pembangunan yang maju dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pemberdayaan dalam peneitian ini untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga masyarakat pada Program Pemberdayaan Kelompok PKK di Desa Lengkongbarang Kecamatan. Cikatomas, Kabupaten. Tasikmalaya sehingga masyarakat dapat lebih mandiri, dan mampu mengimplementasikan lahan.

2.1.2.3 Bentuk-Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan tuntas sampai tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah atau setiap yang di wakilkanya oleh karena itu

diperlukannya berbagai bentuk program. Berdasarkan (NadrahaTalizidhu, 2003) dibutuhkan beragam strategi pemberdayaan, diantaranya:

- 1) Pemberdayaan politik, bertujuan untuk membangun kekuatan tawarmenawar yang diperintah terhadap pemerintah. Hal ini agar orang-orang yang diperintah mendapatkan apa yang mereka miliki secara langsung sebagai produk, jasa, administrasi dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.
- 2) Pemberdayaan ekonomi, diperuntukan sebagai cara untuk memajukan kemampuan yang diminta sebagai konsumen sehingga dapat berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pembangunan, pembayar resi, pembawa masalah bangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
- 3) Pemberdayaan sosial-budaya, bermaksud untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui investasi manusia untuk membangun nilai manusia, penggunaan, dan perlakuan adil terhadap manusia.
- 4) Pemberdayaan lingkungan, direncanakan sebagai strategi pertimbangan ekologi serta konservasi, sehingga pihak yang diperintah dan lingkungan dapat menyesuaikan dengan cara yang dapat beradaptasi secara kondusif serta saling menguntungkan.

Dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat, maka secara umum kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi penting untuk dilakukan dan diterapkan dalam menunjang kehidupan dan mempercepat akselerasi kualitas hidup masyarakat yang pada awalnya belum berdaya menjadi berdaya dan mandiri.

2.1.3 Keberdayaan Masyarakat

2.1.3.1 Konsep Keberdayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keberdayaan yaitu perihal berdaya, berarti kemampuan yang memiliki kekuatan atau daya. Maka definisi keberdayaan adalah proses pemberdayaan yang terjadi atas dasar kemandirian memanfaatkan potensi yang dimiliki. Keberdayaan memiliki makna sebagai upaya redistribusi kekuatan dari pihak yang mempunyai kekuatan untuk yang kurang memiliki daya. Dengan demikian, keberdayaan mengandung pengertian pengurangan tenaga dari pihak yang memiliki kekuatan dan penambahan daya untuk bagian yang diberdayakan.

Menurut (Sumodiningrat, 2000) dalam (Widjajanti, 2011: hlm.16) mendefinisikan bahwa dalam keberdayaan masyarakat menunjukkan adanya kemandiriannya yang dapat diperoleh melalui proses pemberdayaan masyarakat. Kemandirian masyarakat merupakan keadaan yang rasakan oleh masyarakat dengan kesanggupan memperhatikan, menetapkan, dan melaksanakan sesuatu untuk memecahkan permasalahan.

2.1.1.2 Faktor Ketidakberdayaan Masyarakat

Menurut Hatu, J. (2010: hlm.245) ada tiga faktor ketidakberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) Orang-orang yang termasuk dalam kategori tidak berdaya, yaitu mereka memiliki tingkat penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, sekolah, dan perawatan kesehatan.
- 2) Upaya untuk mengurangi jumlah masyarakat yang tidak memiliki kekuatan keberlanjutan akan semakin sulit.
- 3) Menemukan profil keluarga dan wilayah yang kurang mampu terkait dengan program, kegiatan, dan bantuan yang diperlukan untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan.
- 4) Implementasi dan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dalam mendidik orang yang kurang mampu menentukan keberhasilan program tersebut. Memperbaiki dan ngin meningkatkan peran masyarakat secara aktif, meningkatkan program dan meningkatkan desentralisas pengambilan keputusan pendampingan harus mengacu pada pedoman program untuk mengurangi kemiskinan.
- 5) Kemiskinan tidak berasal dari masalah yang signifikan, seperti ketimpangan sosial di daerah dan antar golongan penduduk.

2.1.1.3 Indikator Keberdayaan

Dari hasil kajian konseptual terkait pemberdayaan menjadikan pula indikator keberdayaan masyarakat ada empat diantaranya berkaitan menurut Soeharto, (2008) dalam Firmansyah (2012: hlm.55) diantranya :

- 1) Tingkat Kesadaran dan Keinginan untuk Berubah (*Power To*) merujuk pada yaitu kesadaran dan keinginan untuk terlibat dalam perubahan yang lebih baik. Ini mencakup pemahaman akan pentingnya peran dalam suatu program serta dorongan untuk berpartisipasi dalam pengembangan program tersebut. Keinginan untuk berubah muncul setelah mengenali potensi diri dan kebutuhan untuk berperan dalam perbaikan, baik secara individu maupun kelompok. Kesadaran ini mendorong untuk ikut serta dalam upaya perubahan dan berkomitmen terhadap hasil yang diinginkan.
- 2) Tingkat Kemampuan Meningkatkan Kapasitas untuk Memperoleh Akses (*Power Within*) yaitu yang menggambarkan pertumbuhan kapasitas internal dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk berkembang. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan lembaga eksternal, seperti pemerintah atau organisasi lain, adalah bagian dari indikator ini. Dengan meningkatkan kapasitas diri, lebih mudah untuk memperoleh akses ke berbagai peluang, seperti pendidikan, pelatihan, atau sumber daya yang dapat mendukung perkembangan. Peningkatan kemampuan ini juga memungkinkan untuk lebih aktif dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada.
- 3) Tingkat Kemampuan Menghadapi Hambatan (*Power Over*) yang berfokus pada kemampuan untuk mengatasi tantangan atau hambatan yang muncul dalam perjalanan mencapai tujuan. Hal ini mencakup keterampilan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif dan tuntas. Diperlukan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, membuat keputusan yang tepat, serta beradaptasi dengan perubahan yang ada. Ketika memiliki *power over*, kontrol terhadap kesulitan menjadi lebih besar, dan perubahan peran dalam kelompok dapat terjadi untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama.
- 4) Tingkat Kemampuan Kerjasama dan Solidaritas (*Power With*) yaitu yang mengacu pada kemampuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan solidaritas dan kerja sama antar anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Semakin baik kerja sama dan saling

mendukung, semakin kuat posisi dalam mencapai hasil yang diinginkan. *Power with* juga menciptakan jaringan sosial yang saling mendukung, mempermudah akses bantuan, dan memperluas peluang. Kerja sama yang baik memperkuat solidaritas, yang memungkinkan untuk lebih mudah mengatasi berbagai tantangan bersama.

Kemampuan indikator tersebut *power to*, *power within*, *power over*, dan *power with* yang merupakan elemen-elemen yang saling mendukung dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan mengembangkan keempatnya, akan ada kemampuan yang lebih besar untuk mengelola perubahan, menyelesaikan masalah, dan mencapai kesejahteraan bersama secara berkelanjutan.

Adapun tingkatan keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti dalam Hurairah (2008) dalam (Zairin et al., 2019: hlm.155) yaitu :

- 1) Tingkat keberdayaan pertama adalah memahami terpenuhinya kebutuhan hidupnya.
- 2) Tingkat keberdayaan kedua adalah akses dan pemahaman tentang berbagai sistem serta sumber daya dibutuhkan.
- 3) Tingkat keberdayaan ketiga adalah memiliki kesadaran penuh dalam berbagai potensi, kekuatan, dan kelemahan diri serta lingkungan.
- 4) Tingkat keberdayaan keempat adalah keahlian ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan yang memiliki manfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- 5) Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan memegang kendali diri sendiri dan lingkungan. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keaktifan dan perilaku masyarakat dalam menilai dan menganalisis berbagai kebijakan serta program pemerintahan juga lembaga.

Pada tingkat keberdayaan masyarakat, hal yang penting sejauh mana masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran tentang kebutuhan mereka sendiri serta kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Keberdayaan ini tercermin dalam kemampuan masyarakat untuk ikut serta aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan kehidupan. Ketika masyarakat mampu memegang kendali dalam atas permasalahan yang dihadapinya akan lebih siap untuk menghadapi perubahan dan

mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan tingkat keberdayaan yang tinggi, masyarakat akan lebih mandiri dan mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

2.1.4 Program Pemberdayaan Rumah Binaan Desa

Program Rumah Binaan Desa merupakan merupakan sebuah inisiatif pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan sumber daya alam yang ada. Program ini berfokus pada pengoptimalan pemanfaatan pekarangan rumah warga desa untuk budidaya tanaman pertanian ramah lingkungan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola lahan, serta meningkatkan kemandirian ekonomi melalui kegiatan pertanian berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk anggota PKK, yang berperan sebagai fasilitator dalam memberikan pelatihan, edukasi, dan pendampingan bagi warga. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, program ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri dalam mengelola lahan pertanian, meningkatkan produktivitas hasil pertanian, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar. Selain aspek ekonomi, program ini juga mengedepankan pentingnya keberlanjutan lingkungan, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya teknik pertanian yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, Program Rumah Binaan Desa tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik ditingkat rumah tangga.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, diperlukan hasil-hasil penelitian terdahulu untuk memberikan landasan teori yang kuat, serta untuk membandingkan temuan-temuan yang relevan dalam konteks Program Rumah Binaan Desa berikut merupakan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2012) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian pemberdayaan masyarakat melalui indikator basis pemberdayaan dalam program-program di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut. Dalam jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Responden sebanyak 60 orang dipilih menggunakan metode teknik pengambilan sampel acak bertingkat (*simple random stratified*), yang terdiri dari anggota masyarakat atau penerima manfaat program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Banjarmasin dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kecamatan (PNPM-PPK) di Kabupaten Tanah Laut belum berhasil memberdayakan masyarakat sasaran, sehingga tidak layak disebut sebagai program pemberdayaan komunitas. Dinamika kelompok dan peran fasilitator merupakan faktor penting yang mempengaruhi pemberdayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunendra et al., (2022) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh keaktifan masyarakat dalam program Bank Sampah terhadap tingkat Kesejahteraan. Penelitian dilakukan di Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan teknik pengambilan sampel *simple random sampling* yang melibatkan 14 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket dan observasi, sementara analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel terikat terhadap variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara keaktifan masyarakat dalam program Bank Sampah dan tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi keaktifan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Setianingsi et al., (2022) yang memiliki penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Dalam metode jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang fokus pada

pengamatan kondisi objek yang alami, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, terutama perempuan, dalam program PKK berjalan cukup baik, dengan banyaknya warga yang terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program utama PKK juga mencerminkan adanya swadaya dari masyarakat, baik dalam hal kontribusi tenaga maupun bahan kebutuhan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar keterlibatan masyarakat dalam program PKK dapat ditingkatkan lebih lanjut, dan tim penggerak PKK di Kelurahan Wandoka Utara lebih maksimal dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Aryanti Anggita (2022) dalam penelitian ini yang memiliki dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat partisipasi anggota PKK dalam kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan di Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampar, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya antusiasme anggota dalam mengikuti kegiatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi anggota PKK dalam kegiatan pelatihan keterampilan di desa tersebut. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan utama adalah Ketua PKK Desa Pulau Rambai, sementara informan pendukung terdiri dari 6 anggota PKK yang aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk partisipasi, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi, namun partisipasi anggota PKK masih belum maksimal, yang disebabkan oleh kurangnya minat, komunikasi yang terbatas dari pengurus PKK, serta kurangnya kesadaran anggota.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanis & Marzaman (2020) penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Kecamatan Telaga. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

program PKK telah memberikan banyak manfaat dalam pemberdayaan perempuan, khususnya di tingkat desa, berkat dukungan pemerintah kecamatan dan pembinaan langsung dari pengurus PKK Kabupaten Gorontalo. Namun, pelaksanaan program PKK belum sepenuhnya maksimal. Hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas masyarakat, khususnya perempuan, dan kurangnya penguasaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif dan dukungan penuh dari pemerintah untuk pengembangan dan maksimalisasi program PKK.

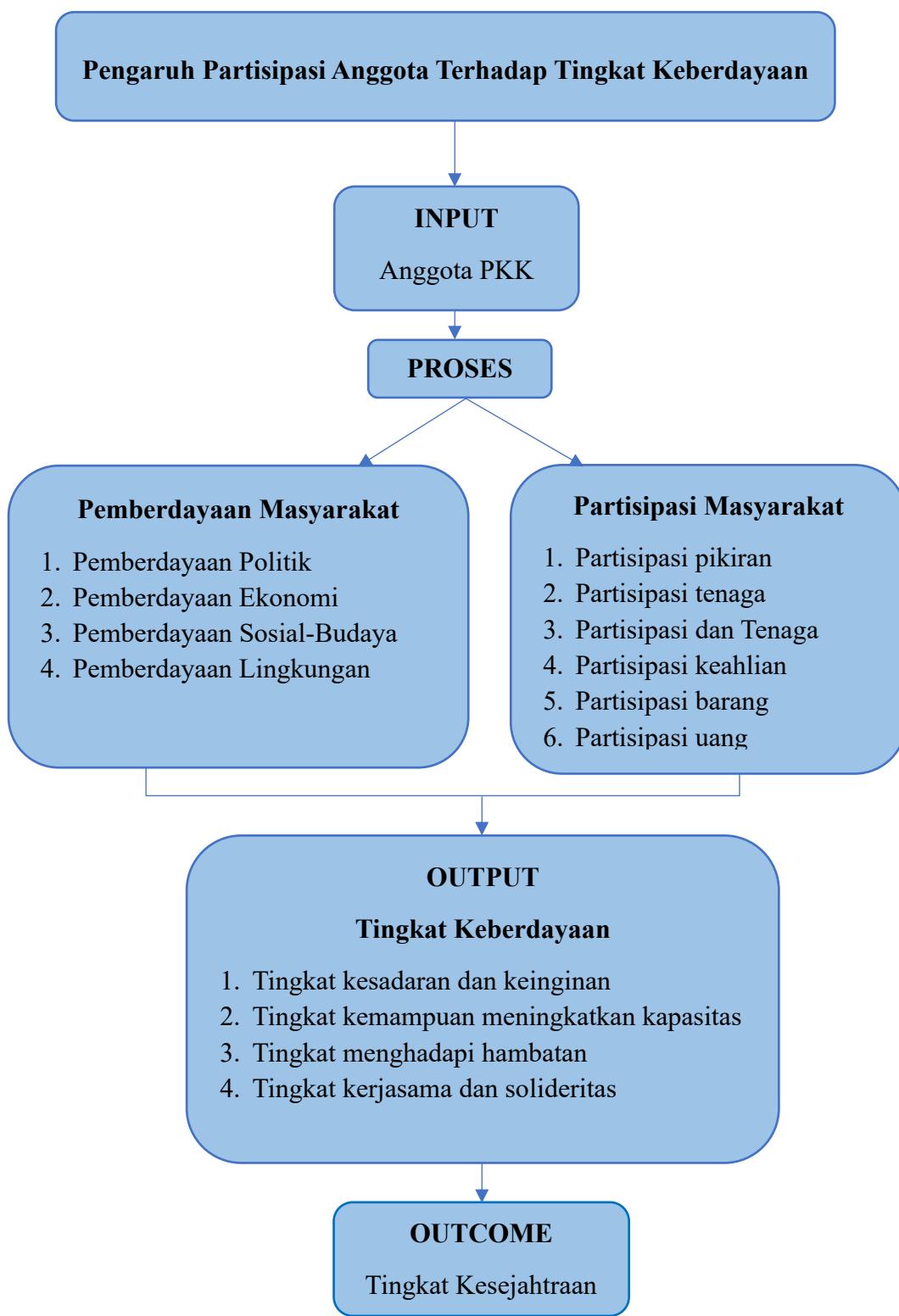
Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma et al., (2022) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Lokasi penelitian ini berada di Desa Canggu, dengan populasi yang terdiri dari 27 aparatur pemerintah desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi dari Uceng (2019). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sementara metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Canggu masih belum optimal. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Akibatnya, hasil pembangunan yang dicapai belum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di desa, sehingga dampak positif dari partisipasi masyarakat belum maksimal.

2.3 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini yang akan dibahas mengenai pengaruh partisipasi anggota terhadap tingkat keberdayaan melihat adanya permasalahan di lapangan bahwa anggota PKK kurang aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan program yang dimana tingkat partisipasi anggota PKK dalam program ini masih terbilang rendah atau belum optimal, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana tingkat keterlibatan anggota PKK dalam kegiatan program selain itu cenderung tidak berpartisipasi baik dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Maka pada penelitian ini untuk mengukur tingkat partisipasi, peneliti menggunakan teori Menurut Keith Davis Sastropoetro (1988) dalam

(Erawati & Mussadun, 2013) bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari 6 (enam) jenis, yaitu (1) partisipasi pikiran, (2) partisipasi tenaga, (3) partisipasi dan tenaga, (4) partisipasi keahlian, (5) partisipasi barang, (6) artisipasi uang.

Adapun faktor lain yang ditemukan dilapangan yaitu tingkat keberdayaan masyarakat dalam Program Rumah Binaan Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, kesadaran dan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keterlibatan program, serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas diri, yang melalui pelatihan dan penerapan pengetahuan yang mempengaruhi keberdayaan masyarakat. Maka dari itu pada tingkat keberdayaan peneliti ini dapat mengukur teori menggunakan pendapat Susiladiharti dan Hurairah (2008) dalam (Zairin et al., 2019: hlm.155) tingkatan keberdayaan masyarakat yang menyatakan ada 4 (empat) faktor, yaitu (1) tingkat kesadaran dan keinginan, (2) tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas, (3) tingkat menghadapi hambatan, (4) tingkat kerjasama dan solideritas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka konseptual pada penelitian Pengaruh Partisipasi Anggota terhadap Tingkat Keberdayaan di Desa Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya ini ditunjukkan pada gambar sebagai berikut yaitu :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

(Sumber: Data Peneliti, 2024)

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2010: hlm.63) hipotesis istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi atau kondisi tertentu setelah pertanyaan penelitian seseorang dibuat menjadi pertanyaan, sebagai tanggapan awal, itu bersifat teoritis, karena didasarkan pada ide-ide yang relevan, tetapi belum didukung oleh bukti empiris yang ditemukan dalam kenyataannya atau tanggapan dari pemahaman teoritis terhadap masalah yang diajukan, meskipun belum didukung oleh data empiris yang dapat memberikan validitas tambahan, karena hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh positif signifikan antara partisipasi anggota PKK pada Program Rumah Binaan Desa terhadap Tingkat Keberdayaan Masyarakat
- H0 : Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara partisipasi anggota PKK pada Program Rumah Binaan Desa terhadap Tingkat Keberdayaan Masyarakat.